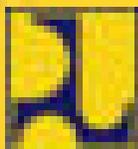


# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **LAKIP**

TAHUN ANGGARAN 2021

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR  
WILAYAH VIII MAKASSAR**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

Jl. Nuri No. 19 Makassar 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749, Email: [diklatpumakassar@yahoo.com](mailto:diklatpumakassar@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar telah selesai disusun sebagai wujud pelaksanaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban serta alat ukur keberhasilan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.16 Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan pimpinan yang terlibat dalam mendukung seluruh kegiatan balai hingga terselesaikannya LAKIP Tahun Anggaran 2021 ini.

Makassar, 14 Januari 2021  
Kepala Balai,



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknik yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2021 anggaran Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah sebesar Rp. 12.474.150.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.779.484.000,00 atau 94,43% dan realisasi fisik 100. Capaian Perjanjian Kinerja TA 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetensi Bidang PUPR Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya terealisasi 838 orang ASN dari target sebanyak 630 orang ASN (capaian 133%), dengan capaian output sebagai berikut:
  - I. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya, terealisasi 166 orang ASN dari target sebanyak 180 orang ASN (capaian 108%).
  - II. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW yang dikembangkan kompetensinya, terealisasi 252 orang ASN dari target sebanyak 180 orang ASN (capaian 140%).
  - III. Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang dikembangkan kompetensinya, terealisasi 420 orang ASN dari target sebanyak 270 orang ASN (capaian 156%).
2. Kegiatan : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya manusia Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari :
  - I. Tingkat Ketepatan Layanan Pengadministrasian Pegawai, terealisasi 78,89% dari target 80% (capaian 98,61%),
  - II. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terealisasi 94,87% dari target 95% (capaian 99%),
  - III. Nilai SAKIP Unit Kerja, terealisasi 76,30% dari target 78,00% (capaian 100%)
  - IV. Tingkat Kinerja Layanan Perkantoran, terealisasi 93,53% dari target 100% (capaian 100%),
  - V. Tingkat Kinerja Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terealisasi 97,3% dari target 100% (capaian 100%),

- VI. Tingkat Kinerja Layanan Umum terealisasi 53,59%, dari target 100% (capaian 100%),
- VII. Tingkat Kinerja Layanan Sarana Internal terealisasi 99,76% dari target 100% (capaian 100%),
- VIII. Tingkat Kinerja Layanan Prasarana Internal terealisasi 97,14% dari target 100% (capaian 100%),
- IX. Tingkat Kinerja Layanan SDM terealisasi 99,92% dari target 100% (capaian 100%),
- X. Tingkat Kinerja Layanan Pengawasan Internal terealisasi 98,1% dari target 100% (capaian 100%),
- XI. Tingkat Kinerja Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal terealisasi 99,18% dari target 100% (capaian 100%),

Dengan capaian output sebagai berikut :

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal, terealisasi 1 layanan dari target sebanyak 1 layanan ( capaian 100%),
2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker, terealisasi 1 layanan dari target sebanyak 1 layanan ( capaian 100%),
3. Jumlah Layanan Perkantoran, terealisasi 1 layanan dari target sebanyak 1 layanan ( capaian 100%)

Adapun kendala/permasalahan utama yang dihadapi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR VIII Makassar pada tahun anggaran 2021 adalah penyerapan anggaran pelatihan yang kurang optimal karena adanya perubahan metode pelatihan yang semula klasikal menjadi distance learning terkait Pandemi covid-19, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelatihan, terutama pelatihan dengan metode distance learning, keterbatasan SDM yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelatihan dengan metode distance learning maupun dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran, serta realisasi peserta pada beberapa pelatihan yang tidak memenuhi target karena calon peserta pelatihan tidak memperoleh ijin atasan untuk mengikuti pelatihan, calon peserta pelatihan memiliki beban pekerjaan yang banyak sehingga sulit untuk meninggalkan pekerjaannya, jaringan internet, saat ikut pelatihan dapat perintah kerja dari atasan dan masih dibebankan pekerjaan sehari-hari untuk segera diselesaikan, mendapat perintah perjalanan dinas terkait tusi peserta.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Tugas dan Fungsi .....	4
I.3 Struktur Organisasi .....	6
I.4 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
II.1 Uraian Singkat Renstra .....	8
II.2 Perjanjian Kinerja .....	16
II.3 Metode Pengukuran .....	20
II.4 Target Tahun 2021 .....	21
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI</b> .....	26
III.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	26
III.2 Sarana Dan Prasarana .....	29
III.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) .....	34
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	35
IV.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	35
IV.2 Perbandingan Kinerja Organisasi .....	36
IV.3 Realisasi Anggaran .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	47
V.1 Permasalahan .....	47

1. Gambar, Lokasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
2. Gambar, Lokasi Wilayah Layanan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
3. Diagram 1.3 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
4. Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM
5. Tabel 2.3 Rekapitulasi Target Realisasi Pelatihan Tahun 2021
6. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja TA 2021
7. Tabel. Komposisi berdasarkan gender Pegawai
8. Tabel. Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai
9. Tabel. Komposisi Tingkat Golongan (PNS) Pegawai
10. Tabel. Komposisi Tingkat Usia (PNS dan NonPNS) Pegawai
11. Tabel. Komposisi Tingkat Teknik/NonTeknik (PNS dan NonPNS) Pegawai
12. Grafik. Komposisi SDM Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
13. Grafik. Komposisi Tingkat Pendidikan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
14. Tabel. Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
15. Tabel. Target Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021
16. Tabel. Perbandingan Kinerja Organisasi 2020 – 2024
17. Tabel 7. Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kegiatan TA 2020 – 2024
18. Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta SDA dan Konstruksi Berdasarkan Kategori Pusat/Daerah
19. Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta SDA dan Konstruksi Berdasarkan Predikat
20. Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Jalan Jembatan, Perumahan, Permukiman, dan Infrastruktur Wilayah Berdasarkan Kategori Pusat/Daerah
21. Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Jalan Jembatan, Perumahan, Permukiman, dan Infrastruktur Wilayah Berdasarkan Predikat
22. Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Berdasarkan Kategori Pusat/Daerah
23. Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Berdasarkan Predikat
24. Tabel. Rekapitulasi Peserta Lulus Sertifikasi
25. Tabel Perbandingan pencapaian kinerja T.A 2020 dan T.A 2021

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang. Sebagai entitas penyelenggara SAKIP, penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No.17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit kerja eselon II dibawah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, berdasarkan Permen PUPR No.15/PRT/M/2015, juga

sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disebut Balai dengan nomenklatur yang diatur berdasarkan Permen PUPR No. 34/PRT/M/2015. Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan LAKIP berpedoman pada peraturan-peraturan terkait, yaitu:

- a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Aksi (T0), serta Pengukuran Kinerja setiap triwulan (T1, T2, T3, T4) wajib dilakukan sehingga tujuan pelaporan kinerja, yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pernerintah untuk meningkatkan kinerjanya dapat tercapai. Penyusunan rencana aksi dan pengukurannya tersebut disusun secara berjenjang sebagaimana penyusunan LAKIP dan PK mulai dari Unit Kerja Eselon II, Unit Organisasi Eselon I, dan Kementerian.

sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan sekaligus untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016 dinyatakan bahwa Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar memiliki fungsi yang terkait erat dengan pengembangan SDM Kementerian PU antara lain : (1)

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (3) pelaksanaan sistem informasi Pengembangan Kompetensi serta desiminasi/sosialisasi; (4) pelayanan sarana Pengembangan Kompetensi; (5) pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi serta penyusunan laporan (6) pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar bertempat di Jalan Nuri No. 19 Makassar 90121, dengan lokasi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar, Lokasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar  
Sumber : Google

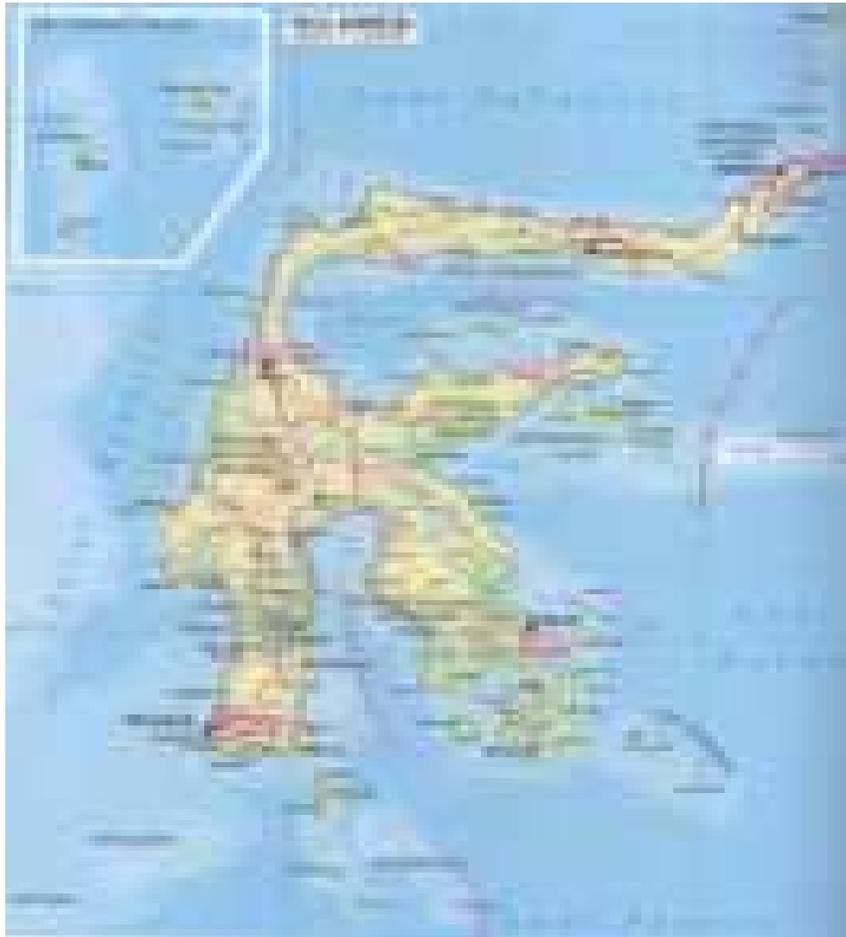
## 1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah salah satu Balai dari 10 (sepuluh) Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kompetensi pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
- c. pelaksanaan sistem informasi Pengembangan Kompetensi serta diseminasi / sosialisasi;
- d. pelayanan sarana Pengembangan Kompetensi ; pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi serta penyusunan laporan;
- e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik aparatur pusat yang berada di wilayah maupun aparatur daerah, yang mempunyai wilayah layanan, 7 Provinsi yakni meliputi: Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Maluku Utara.



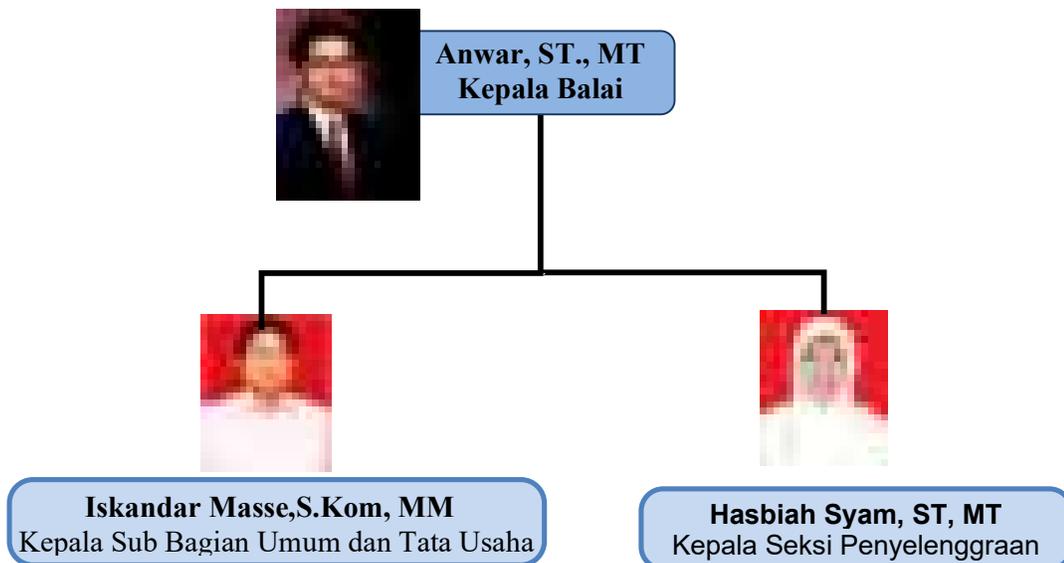
*Gambar, Lokasi Wilayah Layanan  
Balai Pengembangan Kompetensi PUPR  
Wilayah VIII Makassar  
Sumber : Google*



### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas organisasinya Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dibantu oleh beberapa pejabat administrasi dan pelaksana yang meliputi:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Balai, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
- b. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pelaksanaan sistem informasi pengembangan kompetensi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi.



*Diagram  
Struktur Organisasi  
Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar*

### 1.4. ISU STRATEGIS

Renstra Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar 2020-2024 memuat isu strategis dan rencana pencapaian kinerja program 2020-2024. Kondisi dan Tantangan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar Kementerian PUPR Tahun pada 2021 yaitu :

- ❖ Pusat Pengembangan Kompetensi yang bertanggung jawab terhadap pelatihan teknis dan non teknis, Kurang memonitor perencanaan dan pelaksanaan diklat (terutama terhadap peserta diklat),
- ❖ Unor belum memonitor peserta diklat yang telah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan, sehingga banyak peserta yang tidak hadir,
- ❖ Data kebutuhan pelatihan setiap Unor ;belum akurat, sehingga masih terdapat banyak judul pelatihan yang digant / dibatalkan,
- ❖ Belum terdapat SOP penilaian pelatihan, khususnya pelatihan teknis, di lingkungan BPSDM,
- ❖ Belum ada prosedur jika Unit Organisasi terkait menunda pelatihan (termasuk penugasan peserta) dalam jangka waktu kurang dari 3 hari sebelum pembukaan,
- ❖ Penyebaran informasi diklat telah dilakukan di wilayah layanan kerja Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara), namun masih banyak yang tidak memberikan respon yang baik untuk mengusulkan pelatihan-pelatihan prioritas yang menjadi kebutuhan instansinya dan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan. Hal ini terjadi karena kurang adanya komitmen dari pimpinan organisasi terhadap pentingnya diklat bagi pegawai dan organisasi.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS**

**2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi**

Visi dalam hal ini adalah rumusan umum/arah mengenai keadaan yang diinginkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada akhir tahun 2021 agar dapat berkarya secara konsisten dan akuntabel, responsif, inovatif,serta produktif, dalam upaya mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , yaitu :

**“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mendukung Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

**“Terpenuhinya Kebutuhan SDM Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Andal Di Setiap Lini Organisasi”**

Untuk mendukung Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka Visi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah:

**“Tersedianya SDM Aparatur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi”**

Sebagai pelayan publik yang mumpuni, inovatif serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas, kerjasama, dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan menjiwai nilai budaya BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT serta berkarakter berani dan berjiwa seni.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapat mengetahui peran, program serta hasil yang akan dicapai. Misi ke lima Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendasari misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

**“Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.”**

Sejalan dengan misi tersebut maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memaparkannya menjadi Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:

- ❖ **Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PUPR Pusat dan Daerah;**
- ❖ **Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi kinerja SDM PUPR ;**
- ❖ **Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR ;**
- ❖ **Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM Bidang PUPR.**

Untuk mendukung misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka misi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah : Menyelenggarakan pelatihan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai kebutuhan Unit Organisasi di Kementerian PUPR ;

- Menata kelembagaan Balai Pelatihan yang efektif dan efisien
- Melaksanakan Sistem Informasi Pelatihan yang efektif dan efisien
- Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur Balai
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan dengan efektif dan efisien

**Sasaran strategis** yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah *Meningkatnya SDM yang Kompeten sesuai dengan Kompetensi Jabatan*. Sementara **sasaran program** yang ingin dicapai adalah *Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan Tahun 2021*, yang akan dicapai melalui **strategi kegiatan** :

1. Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur,
2. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi,
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
4. Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR

Sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020-2024 bahwa tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah: "Mengembangkan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat." Tujuan yang akan dicapai berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) Meningkatkan kompetensi standar, indikator pencapaian:
  - a. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan;
  - b. Persentase kelulusan peserta pelatihan sebesar 80% dengan nilai Baik Sekali;
- 2) Meningkatkan kinerja SDM, indicator pencapaian:
  - a. Persentase disiplin kehadiran pegawai tepat waktu sebesar 90%;
  - b. Terpenuhinya lingkungan kerja yang memadai;
  - c. Persentase penilaian kinerja pegawai sebesar 80% adalah Baik;
  - d. Persentase penilaian perilaku pegawai sebesar 100% adalah Baik.
- 3) Meningkatkan pengembangan jabatan fungsional, indikator pencapaian :
  - a. Persentase penempatan, penugasan jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya sebesar 95%;
  - b. Persentase jabatan fungsional yang Menyusun DUPAK tepat waktu sebanyak 90%.

- 4) Mengoptimalkan penempatan peran SDM PUPR melalui peta karir dan jenjang karir, indikator pencapaian:
  - a) Persentase penempatan SDM PUPR dalam jabatan sesuai dengan persyaratan jabatan tertentu sebesar 100%.

Sejalan dengan tujuan BPSDM, maka Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar merumuskan tujuan yang dapat menunjang tujuan pertama BPSDM, yaitu :

1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan diklat;
2. Meningkatkan produktifitas dan pengelolaan organisasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar; dan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar dan jalinan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Sedangkan sasaran Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yaitu :

- Tersedianya lulusan pelatihan dengan nilai kelulusan baik
- Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai (standar)
- Tercapainya tingkat kepuasan pelanggan diklat rata-rata sebesar 80%.
- Tercapainya tingkat akurasi rata-rata ketersediaan data keuangan dan BMN sesuai rencana dan peraturan yang berlaku sebesar 100% setiap tahun
- Tercapainya tingkat penyerapan anggaran rata-rata sebesar 90% setiap tahun

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar untuk mendukung capaian diatas meliputi :

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu kediklatan;
2. Modernisasi pengelolaan institusi dan pelayanan kediklatan;
3. Meningkatkan kualitas pembinaan SDM aparatur dan operasional pelaksanaan kegiatan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
4. Meningkatkan intensitas komunikasi dan efektivitas publikasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana publikasi dan koordinasi.

### 2.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan

- a. Pengembangan SDM PUPR dilaksanakan untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berkualitas dan berintegritas melalui pengembangan karir, kompetensi, kualifikasi dan integritas SDM PUPR. Terkait dengan hal tersebut, maka arah kebijakan yang ditempuh oleh BPSDM pada periode 2020- 2024 adalah:
  - 1) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku SDM PUPR secara seimbang;
  - 2) Menerapkan UU ASN dan Program Reformasi Birokrasi sebagai landasan kerja.
  
- b. Dalam Renstra Kementerian PUPR telah ditetapkan 2 (dua) jenis program untuk unit organisasi (Eselon I), yaitu :
  - 1) Program **Teknis** merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal); dan
  - 2) Program **Generik** program-program Kementerian PUPR yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi, salah satu di antaranya adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, meliputi kegiatan:
    - a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen;
    - b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja;
    - c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Konstruksi;
    - d. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
    - e. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Kegiatan untuk unit Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merangkum tugas dan fungsi unit Eselon II di bawahnya yang meliputi :

1. Sekretariat Badan,
2. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja,
3. Pusdiklat Sumber Daya Air dan Permukiman,
4. Pusdiklat Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
5. Pusdiklat Manajemen, Konstruksi dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Adapun kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Penilaian kompetensi dan evaluasi untuk mendapatkan peta kompetensi SDM PUPR;
  2. Pemetaan karir dan evaluasi untuk pengembangan karir SDM PUPR;
  3. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi;
  4. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
  5. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
  6. Pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana
- c. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar meliputi Program Dukungan Manajemen untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 12.474.150.000, terdiri dari :
1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dengan anggaran Rp. 2.467.039.000,-
    - a. Bidang SDA dan Permukiman dengan anggaran Rp. 342.992.000
    - b. Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan anggaran Rp. 583.226.000
    - c. Bidang Manajemen dan Konstruksi dengan anggaran Rp. 1.540.821.000

2. Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran Rp. 10.007.111.000,-
  - a. Layanan Perkantoran dengan anggaran Rp. 6.796.297.000
  - b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan anggaran Rp. 623.574.000
  - c. Layanan Umum dengan anggaran Rp. 284.313.000
  - d. Layanan Sarana Internal dengan anggaran Rp. 1.370.185.000
  - e. Layanan Prasarana Internal dengan anggaran Rp. 475.000.000
  - f. Layanan SDM dengan anggaran Rp. 271.935.000
  - g. Layanan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 119.395.000
  - h. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal dengan anggaran Rp. 66.412.000

**Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM 2020-2024**

Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Dukungan Manajemen								
Meningkatnya Dukungan manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	%	70	71	72	74	76	76

*Sumber: Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024*

Pelaksanaan kegiatan utama BPSDM dirumuskan ke dalam 4 (empat) kelompok kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tingkat eselon II beserta Balai/UPT di Badan Pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Talenta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Talenta.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

3. Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini dilaksanakan Sekretariat BPSDM, Politeknik Pekerjaan Umum, Pusat Pengembangan Talenta, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, serta UPT Balai.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Politeknik Pekerjaan umum. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung sebagai salah satu unit pelayanan teknis yang berada di bawah BPSDM melaksanakan Kegiatan 2 (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR), serta Kegiatan 3 (Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia). Sasaran Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII  
Makassar 2020-2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	Target Kinerja					Total	
		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
<b>SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: INDEKS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR PUPR</b>	<b>%</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	
<b>KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR</b>								
<b>SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>								
1	Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya	Orang	750	540	830	810	540	3.470
<b>Output:</b>								
1	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDA dan Permukiman</b>							
	1.1 Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	270	180	380	180	180	1.190
2	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW</b>							
	2.1 Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	150	150	120	250	150	820
3	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi</b>							
	3.1. Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang dikembangkan kompetensinya	Orang	330	210	330	380	210	1.460

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
SASARAN KEGIATAN 3: <i>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR</i>								
Indikator Kinerja Kegiatan:								
1	Tingkat Ketepatan Layanan Pengadministrasian Pegawai	%	83.81	83.81	84.00	85.00	85.00	85.00
2	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	90.43	91.00	92.00	95.00	95.00	95.00
3	Nilai SAKIP Unit Kerja	%	75.50	75.50	76.50	77.50	78.50	78.50
Output:								
1	Layanan Perkantoran							
	1.1 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2	10
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal							
	2.1 Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	3	3	3	3	3	15
3	Layanan Umum							
	3.1 Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	2	2	2	2	10
4	Layanan Prasarana Internal							
	4.1 Jumlah Layanan Prasarana Internal	Layanan	3	3	2	2	2	12
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							
	5.1 Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	2	2	2	2	2	10
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							
	6.1 Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	2	2	2	2	2	10

### 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Pembuat Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara Sekretaris BPSDM dengan Kepala Balai, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penyusunan penetapan kinerja senantiasa memperhatikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran atau RKA. Dokumen PK disusun setelah adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 sehingga PK yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada. Dokumen Penetapan Kinerja tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan oleh Kepala BPSDM untuk :

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP;
- c. Sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan Permen PU No. 17/PRT/M/2012, dokumen penetapan kinerja terdiri atas :

- a. Pernyataan Penetapan Kinerja; merupakan pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu, dan
- b. Formulir Penetapan Kinerja; yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut :

Sasaran strategis, merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran Strategis yang dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon II adalah Sasaran Strategis sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Unit Organisasi Eselon I Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja. Untuk unit Eselon II, mencantumkan indikator kinerja output penting.

Target kinerja, merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun. Dengan demikian target kinerja yang dicantumkan dalam lampiran Dokumen PK adalah target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tahun berjalan. Jumlah anggaran yang dialokasikan, merupakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu jumlah yang didasarkan pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun berjalan.

Indikator Kinerja Umum (IKU) Program BPSDM adalah meningkatnya kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan. Pada tahun 2021 IKU Program BPSDM tersebut diukur dengan persentase kompetensi sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan persyaratan jabatan sebesar 15%. Program BPSDM tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan dalam program BPSDM adalah Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Balai Pengembangan Kompetensi sebagai Unit Pelaksana Pelatihan, kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan PK.

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM dengan sasaran kegiatan / indikator kinerja selama 5 (lima) tahun, yaitu 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel. berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Perubahan Perjanjian Kinerja Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar TA 2021**

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET			
-1	-2	3	4	5
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<i>IKSP: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR</i>	71%			
<b>KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR</b>	<b>Awal</b>	<b>Revisi 1</b>	<b>Revisi 2</b>	<b>Revisi 3</b>
<b>SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>				
<b>IKK: Jumlah ASN Bidang PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang
<b>OUTPUT:</b>				
1. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang Dikembangkan Kompetensinya	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang
2. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Dikembangkan Kompetensinya	150 orang	150 orang	180 orang	180 orang
3. Jumlah ASN Bidang Manajemen yang Dikembangkan Kompetensinya	210 orang	210 orang	210 orang	270 orang
<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM	Rp. 19.533.942	Rp. 13.643.942	Rp. 12.632.531	Rp. 12.474.150

Perjanjian Kinerja awal disusun pada bulan Januari 2021 dengan target peserta sebanyak 630 orang ASN terlatih dan dengan anggaran sebesar Rp. 19.533.942.000. Pada bulan Februari 2021, dilakukan revisi-1 Perjanjian Kinerja yang disebabkan adanya perubahan pagu organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, Pergeseran antara KRO (Kegiatan Rincian Output) dan RO (Rincian Output) yang sama dan dalam Rangka refocusing anggaran dan realokasi anggaran pemenuhan kegiatan Bela Negara bagi CPNS menjadi Rp. 13.643.942,000 revisi-2 Perjanjian Kinerja yang disebabkan adanya perubahan pagu organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, dalam Rangka

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

refocusing anggaran menjadi Rp. 12.632.531.000, revisi-3 Perjanjian Kinerja yang disebabkan adanya perubahan pagu serta pergantian pimpinan Kepala Badan Pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, anggaran menjadi Rp. 12.474.150.000.

**Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar TA 2021 Revisi-3**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Biaya
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM Dukungan Manajemen</b>				<b>12.474.150.000</b>
<b>KEGIATAN Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</b>				<b>2.467.039.000</b>
<b>SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>				
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>				<b>2.467.039.000</b>
1	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDA dan Permukiman	Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	180 Orang	342.992.000
2	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah ASN ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dikembangkan kompetensinya	180 Orang	583.226.000
3	Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen	Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya	270 Orang	1.540.821.000
<b>KEGIATAN dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR</b>				
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b>				
1	Tingkat Ketepatan Layanan Pengadministrasian Pegawai	Tingkat Ketepatan Layanan Pengadministrasian Pegawai	83.81	
2	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90.43	
3	Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	75.50	
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>				<b>10.007.111.000</b>
1	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan perkantoran	1 Layanan	6.796.297
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Interna	1 Layanan	623.574
3	Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	284.313
4	Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1.370.185
5	Layanan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	475.000
6	Layanan SDM	Jumlah Layanan SDM	1 Layanan	271.935
7	Layanan Pengawasan Internal	Jumlah Layanan Pengawasan Internal	1 Layanan	119.395
8	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Layanan	66.412

### 2.3. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar secara umum dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran Capaian Kegiatan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut.:

**Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Kegiatan**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR				
Jumlah ASN PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	Jumlah ASN PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya : 1. Target ASN PUPR Yang Dikembangkan kompetensinya berdasarkan DIPA 2. Capaian ASN PUPR yang dikembangkan kompetensinya sesuai kriteria	Dihitung jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun	Internal Balai, e-pelatihan
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pengembangan SDM				
Tingkat Ketepatan Layanan Pengadministrasian Pegawai	%	Nilai Survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan kepegawaian dan ketepatan layanan administrasi kepegawaian (30%)	Survey kepada seluruh pegawai	Internal Balai
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Aplikasi Omspan
Nilai SAKIP Unit Kerja	%	Penilaian SAKIP Unit Kerja Balai oleh tim BPSDM	Nilai SAKIP periode sebelumnya	Internal BPSDM

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

### 2.4. TARGET TAHUN 2021 MENURUT RENSTRA

Target yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar merupakan target berdasarkan DIPA yang mendukung target Renstra BPSDM Kementerian PUPR. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

**Tabel 2.6 Target Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar Tahun 2020 – 2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/OUTPUT		SATUAN	Target Kinerja
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: INDEKS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR PUPR</b>		%	70
<b>KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PUPR</b>			
<b>SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>			
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>			
1	Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya	Orang	750
<b>Output:</b>			
1	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang SDA dan Permukiman</b>		
	1.1 Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya	Orang	330
2	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW</b>		
	2.1 Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan dan PIW yang dikembangkan kompetensinya	Orang	240
3	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi</b>		
	3.1. Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang dikembangkan kompetensinya	Orang	180
<b>KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
<b>SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR</b>			
<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>			
1	Tingkat Ketepatan Layanan Pengadministrasian Pegawai	%	83.81
2	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	90.43
3	Nilai SAKIP Unit Kerja	%	75.50
<b>Output:</b>			
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	1.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2
2	Layanan Dukungan Manajemen Satkernal		
	2.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3
3	Layanan Perkantoran		
	3.1 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<i>IKSP: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR</i>	71%
<b>KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>	
<b>IKK: Jumlah ASN Bidang PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	<b>10.000 orang</b>
<b>OUTPUT: 1. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	<b>180 orang</b>
<b>2. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	<b>150 orang</b>
<b>3. Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	<b>210 orang</b>

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

**ANGGARAN**

**Rp. 19.533.942.000**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**SUGIYARTANTO**

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

**ANWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<i>IKSP: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR</i>	71%
<b>KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>	
<b>IKK: Jumlah ASN Bidang PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	10.000 orang
<b>OUTPUT: 1. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	180 orang
<b>2. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	150 orang
<b>3. Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	210 orang

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

**ANGGARAN**

**Rp. 13.643.942.000**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**SUGIYARTANTO**

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

**ANWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<i>IKSP: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR</i>	71%
<b>KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>	
<b>IKK: Jumlah ASN Bidang PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	10.000 orang
<b>OUTPUT: 1. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	180 orang
<b>2. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	180 orang
<b>3. Jumlah ASN Bidang Manajemen dan Konstruksi yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	270 orang

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

**ANGGARAN**

**Rp. 12.632.531.000**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**SUGIYARTANTO**

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

**ANWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<i>IKSP: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR</i>	71%
<b>KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR</b>	
<b>IKK: Jumlah ASN Bidang PUPR yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	10.000 orang
<b>OUTPUT: 1. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	180 orang
<b>2. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	180 orang
<b>3. Jumlah ASN Bidang Manajemen yang Dikembangkan Kompetensinya</b>	270 orang

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR dan Dukungan Manajemen Pengembangan SDM

**ANGGARAN**

Rp. 12.474.150.000

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**KHALAWI AH**

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

**ANWAR**

**BAB III****KAPASITAS ORGANISASI****3.1. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam melaksanakan kegiatan, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung. Sampai tahun 2021, jumlah pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah 37 orang dengan jumlah PNS sebanyak 14 orang dan non PNS sebanyak 23 orang. Rincian profil pegawai Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel. Komposisi berdasarkan gender Pegawai**

<b>PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN</b>			
	<i>LAKI – LAKI</i>	<i>PEREMPUAN</i>	<i>JUMLAH</i>
<i>PNS</i>	7	7	14
<i>NON PNS</i>	17	6	23
<i>JUMLAH</i>	37		

**Tabel. Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai**

<b>PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN</b>					
	S2	S1/D4	SMA	SMP	SD
PNS	5	6	2		1
NON PNS		13	8	2	
JUMLAH	5	19	10	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>				

Tabel. Komposisi Tingkat Golongan (PNS) Pegawai

PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN					JUMLAH
	IV	III	II	I	
KEPALA BALAI	1	-	-	-	1
SUBBAG UMUM DAN TATA USAHA	-	9	1	1	11
SEKSI PENYELENGGARA	1		1	-	1
WIDYAIWARA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

Tabel. Komposisi Tingkat Usia (PNS dan NonPNS) Pegawai

PEGAWAI BERDASARKAN USIA				
	20 - 30	31 - 40	41 - 50	≥ 51
PNS		5	5	4
NON PNS		15	7	1
JUMLAH		20	12	5
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>			

Tabel. Komposisi Tingkat Teknik/NonTeknik (PNS dan NonPNS) Pegawai

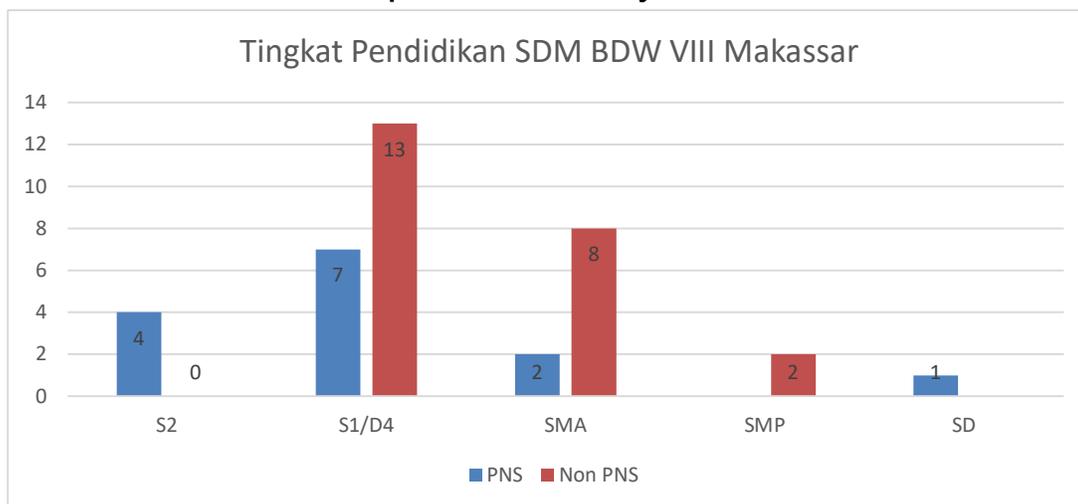
PEGAWAI BERDASARKAN TEKNIK / NONTEKNIK		
	TEKNIK	NON TEKNIK
PNS	5	9
NON PNS	4	19
JUMLAH	9	28
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	

**Grafik. Komposisi SDM Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar**



Dari gambaran tersebut, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa dari 14 orang PNS, yang terdiri dari 3 orang struktural, 11 orang pelaksana, 0 orang Widyaiswara, Jabatan Fungsional 2 orang (muda 1 orang dan mahir 1 orang) dan 23 orang Pegawai Non PNS, yang terbagi menjadi 14 orang substantif dan 9 orang lainnya bertugas sebagai penunjang di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar. Sedangkan gambaran pendidikan untuk seluruh pegawai dapat dilihat pada grafik berikut ini ;

**Grafik. Komposisi Tingkat Pendidikan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar**



### 3.2. SARANA DAN PRASARANA

Masih banyaknya sarana prasarana yang belum memadai khususnya di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kompetensi. Maka pembangunan, rehabilitasi gedung baik kelas dan sarana lainnya dianggarkan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Adapun sarana dan prasarana Fasilitas yang ada pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar antara lain:

1. Ruang Kelas Besar: 3; kelas kapasitas 60 orang,
2. Ruang kelas kecil: 2; kelas kapasitas 30 orang,
3. Ruang serba guna/aula, 1 kelas dengan kapasitas 120 orang,
4. Asrama peserta, 81 kamar dengan AC, kapasitas 162 orang,
5. Asrama peserta, 2 kamar dengan AC, kapasitas 6 orang,
6. Asrama Widyaiswara/Instruktur, 10 kamar dengan AC, kapasitas 20 Orang,
7. Asrama Widyaiswara/Instruktur VVIP, 1 kamar dengan AC, kapasitas 1 Orang (singelbed),
8. Ruang makan, kapasitas 150 Orang
9. Ruang Lobby, kapasitas 20 Orang
10. Mushola, kapasitas 75 Orang
11. Laboratorium computer, kapasitas 30 Orang
12. Ruang Fitnes, kapasitas 15 Orang
13. Ruang Relaksasi, kapasitas 8 Orang
14. Ruang Karoke, kapasitas 6 Orang
15. Ruang Rapat Kapasitas 12 Orang
16. Ruang Perpustakaan Kapasitas 8 Orang
17. Ruang Widyaiswara Kapasitas 6 Orang
18. Ruang Smart Class Kapasitas 30 Orang
19. Ruang PPID Kapasitas 6 Orang
20. Poliklinik /Ruang Ibu dan Anak, kapasitas 1 Orang
21. Lapangan Futsal
22. Lapangan parkir

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

### PEMBELIAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI TA.2021

No	Nama Barang	Merk/Tpe	Satuan	Jumlah	Nilai SPM
1	Video Monitor	LED Screen Videotron	Buah	1	190.852.750
2	Video Processor	Novastar	Buah	1	
3	Head Set	Plantronics Blackwire	Buah	25	38.225.000
4	External/PortableHardisk	Seagate 2TB	Buah	4	6.517.280
5	Hard Disk	Hardisk SSD 256GB	Buah	4	6.732.000
6	Switch	SWitch LAN TP Link 16 Poin	Buah	5	15.730.000
7	Thermal Imaging Camera	Camera Fotric 223B	Buah	2	47.364.900
8	CCTV - Camera Control Television System	Camera Indoor Hikvision DS-2CD1121-1	Buah	21	98.844.900
9	Microphone / Wireless MIC	Desktop Wireless Mic. Krezt MC-8UNV	Buah	3	32.120.000
				<b>66</b>	<b>436.386.830</b>

### Daftar Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Tahun 2021

No	Nama Barang	Merk/Tpe	Satuan	Jumlah	Nilai SPM
1	Lemari Besi/Metal	Informa	Buah	1	134,750,000
2	Meja Komputer	Informa	Buah	8	19,085,000
3	Alat Pemanas Prosesing ( Water Heater )	Elektrolux	Buah	4	23,210,000
4	Lemari Besi/Metal	JTC-3931	Buah	10	83,957,500
5	Meja Rapat	Informa	Buah	20	137,500,000
6	Meja Kerja Besi/Metal	Informa	Buah	30	196,845,000
7	Lampu Belajar	Xiomi Smart LED Desk Lamp 220-240 volt	Buah	28	35,420,000
8	Alat Pemanas Prosesing ( Water Heater )	ARISTON	Buah	23	133,457,500
9	Tempat Tidur Kayu	Brand Informa Tipe Cusco Mattres W/Gift 120x200x20	Buah	24	161,990,400
				<b>148</b>	<b>926,215,400</b>

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Tabel. Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Kompetensi PUPR  
Wilayah VIII Makassar

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Keterangan
<b>I</b>	<b>Ruang Kelas</b>		Dilengkapi fasilitas : Meja Besi/Metal Kursi Besi/Metal AC, Whiteboard Soundsystem/wireless LCD Projector Flipchart, Jam Dinding Pengharum Ruangan CCTV, Podium, Wifi
1.	Ruang Smart Class (Lt.1)	30 Orang	
2.	Ruang Kelas Bantimurung (Lt.1)	30 Orang	
3.	Ruang Kelas Malino (Lt.2)	60 Orang	
4.	Ruang Kelas Tanjung Bira (Lt.2)	30 Orang	
5.	Ruang Kelas Bambapuang	60 Orang	
<b>II</b>	<b>Lobby / Ruang PPID</b>	<b>20 Orang</b>	Dilengkapi fasilitas : Sofa, Televisi, Meja, AC Jam Dinding, Wifi
<b>III</b>	<b>Ruang Serbaguna/Aula</b>	<b>120 Orang</b>	Dilengkapi fasilitas : Meja Besi/Metal Kursi Besi/Metal AC, CCTV, Podium Soundsystem/wireless LCD Projector Jam Dinding, Wifi Pengharum Ruangan
<b>IV</b>	<b>Ruang Makan</b>	<b>150 Orang</b>	Dilengkapi fasilitas : Meja Makan, Jam Dinding Kursi Besi/Metal AC, Lemari Es Pengharum Ruangan Wastafel + Cermin

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Keterangan
<b>V</b>	<b>Asrama</b>		
	Asrama Nuri 1 (Asrama A Lt.1) Asrama Nuri 2 (Asrama A Lt.2) Asrama Nuri 3 (Asrama A Lt.3) Asrama Dara 1 (Asrama B Lt.1) Asrama Dara 2 (Asrama B Lt.2)  <b>Mess Instruktur A</b> Merpati I (Lantai 1) Merpati II (Lantai 2)  <b>Mess Instruktur B</b> Rajawali (Lantai 1) Rajawali (Lantai 2)	kamar x bed	Dilengkapi fasilitas : Spring Bed Meja Kayu Kursi Besi/Metal Lemari Kayu Nakas Televisi AC Cermin Jam Dinding Jemuran Handuk Tong Sampah CCTV Wifi
<b>VI</b>	<b>Ruang Fitnes</b>	<b>15 Orang</b>	
			Dilengkapi fasilitas : Treadmil (2 unit) Barbel set 50kg (1 unit) Dumbell set W/Pls 10kg Motorized Treadmill (elektrick) (2 unit) Wonder core, Easy Slider Home Gim 3 sisi New X-Bike (sepeda statis) (2 unit) Tracer 802 I AC, Kaca Cermin, Wifi
<b>VII</b>	<b>Poliklinik /Ruang Ibu dan Anak</b>	<b>1 Orang</b>	
			Dilengkapi fasilitas : Meja Kayu Kursi Besi/Metal Tempat Tidur Timbangan Lemari Obat Alat Tensi Tabung Oksigen Dispenser Televisi AC Jam Dinding Wifi

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Keterangan
VIII	Musholla	75 Orang	Dilengkapi fasilitas : Mimbar Soundsystem Al-quran Papan Informasi Lemari Besi/Metal Mukena Kain Sarung AC
IX	Gedung Kantor	60 Orang	
			Dilengkapi fasilitas : Meja Kayu Kursi Kerja Komputer Lemari Kaca Filling Cabinet Dispenser Televisi AC Wifi
X	Lapangan Parkir		4 Mobil Jenis Inova, 1 Motor manual Jenis Honda
XI	Kendaraan Dinas	4 Roda 4 dan 4 Roda 2	
XII	Ruang Rapat	12 Orang	
XIII	Ruang Perpustakaan	8 Orang	
XIV	Ruang Widyaiswara	6 Orang	

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

### 3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar telah melakukan 10 (sepuluh) kali revisi anggaran. Revisi pertama terdapat penghematan anggaran belanja yang signifikan, penghematan anggaran tersebut untuk Refocussing anggaran yang menyebabkan adanya perubahan pagu anggaran dan pergeseran output antar satker di BPSDM untuk penanggulangan/pencegahan Covid-19. Selama tahun anggaran 2021 terjadi 10 (sepuluh) kali revisi DIPA yang terdiri dari revisi dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan revisi dilakukan di DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan revisi DIPA tersebut menyebabkan adanya pengurangan anggaran dan pergeseran anggaran.

No	DIPA	Tanggal Terbil Pagu {Rp}	semula	menjadi	Keterangan
1	Awal	23 November 2020	19.533.942.000		DIPA Awal
2	Revisi I (Kanwil)	12 Januari 2021	19.533.942.000	19.533.942.000	Revisi Kanwil
3	Revisi II (DJA)	17 Februari 2021	19.533.942.000	13.643.942.000	Penyesuaian Penghematan Anggaran dalam rangka Refocusing I dan Realokasi Anggaran Tahun 2021
4	Revisi III (Kanwil)	16 April 2021	13.643.942.000	13.643.942.000	Revisi Kanwil
5	Revisi IV (DJA)	27 Juni 2021	13.643.942.000	13.484.856.000	Penyesuaian Penghematan Anggaran dalam rangka Refocusing II dan Realokasi Anggaran Tahun 2021
6	Revisi V (Kanwil)	8 Juli 2021	13.484.856.000	13.484.856.000	Revisi Kanwil
7	Revisi VI (DJA)	20 Agustus 2021	13.484.856.000	12.632.531.000	Penyesuaian Penghematan Anggaran dalam rangka Refocusing IV dan Realokasi Anggaran Tahun 2021
8	Revisi VII (Kanwil)	06 October 2021	12.632.531.000	12.632.531.000	Perubahan penyesuaian beberapa diklat, perubahan pemaketan dan penambahan volume pada belanja modal
9	Revisi VIII (DJA)	02 November 2021	12.632.531.000	12.474.150.000	Revisi Drop PNBPN, penghapusan pagu PNBPN Penggunaan
10	Revisi IX (Kanwil)	19 November 2021	12.474.150.000	12.474.150.000	Pergeseran dalam satu RO, satu KRO, satu Satker, Penambahan volume RO, Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA, perubahan pejabat perbendaharaan
11	Revisi X (Kanwil)	27 December 2021	12.474.150.000	12.474.150.000	Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP disebutkan bahwa dalam LAKIP turut disertakan penilaian kinerja yang diukur dari masing-masing indikator kinerja utama (*outcome*) setiap triwulan. Pada Kementerian PUPR pada umumnya dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar pada khususnya, penilaian kinerja per tiga bulanan ini diukur dengan aplikasi *E-Monitoring* sistem pelaporan secara elektronik yang mengukur target dan realisasi baik dari segi keuangan maupun segi pengerjaan fisik. Hasil pelaporan triwulan pencapaian kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut ;

Tabel. Target Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	Program Dukungan Manajemen			12,474,150	11,779,484	100	94.4	100	100	100
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR			2,467,039	2,381,064	100	96.52	100	100	100
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	630	Orang	2,467,039	2,381,064	100	96.52	100	100	100
2	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia			10,007,111	9,398,420	100	93.92	100	100	100
2	Layanan Perkantoran	2	Layanan	6,796,297	6,356,260	100	93.53	100	100	100
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	623,574	606,752	100	97.3	100	100	100
4	Layanan Umum	1	Layanan	284,313	152,361	100	53.59	100	100	100
5	Layanan Sarana Internal	153	unit	1,370,185	1,366,920	100	99.76	100	100	100
6	Layanan Prasarana Internal	1	unit	475,000	461,400	100	97.14	100	100	100
7	Layanan SDM	38	orang	271,935	271,730	100	99.92	100	100	100
8	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	119,395	117,130	100	98.1	100	100	100
9	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	66,412	65,867	100	99.18	100	100	100
				12,474,150	11,779,484	100	94.4	100	100	

RN : Rencana	RL : Realisasi
 kinerja < 30	 75 < kinerja < 85
 30 < kinerja < 50	 kinerja > 85
 50 < kinerja < 65	 - Belum bisa dinilai
 65 < kinerja < 75	

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Pengukuran capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja balai dapat dikategorikan **Memuaskan**. Dengan persentase keuangan sebesar 94.43% dan fisik 100%. Sedangkan dalam pencapaian target, hanya target Pencegahan dan Penanganan Covid 19 dalam kegiatan Layanan Umum yang tidak dapat mecapai target dengan persentase keuangan 53.59%, kendala yaitu perencanaan anggaran yang awalnya diperuntukan untuk isolasi bagi pegawai dan keluarga PUPR yang terkena covid 19 di asrama balai pengembangan PUPR wilayah VIII makassar akan tetapi batal.

### 4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Pagu alokasi anggaran Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar T.A. 2020 adalah sebesar Rp.14.866.614.000,- dimana realisasi anggaran sebanyak Rp. 13.391.407.000,- dengan penyerapan 90,08% untuk keuangan dan 100% untuk fisik. Sedangkan untuk T.A. 2021 pagu alokasi anggaran mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp. 12,474,150.000,- dengan penyerapan penyerapan 11,779,484,000 dengan penyerapan 94,43% untuk keuangan dan 100% progres fisik ;

**Tabel. Perbandingan Kinerja Organisasi 2020 – 2021**

NO	Program/Kegiatan/Output	Vol/ Satuan	Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2021				
			Pagu (Rp Ribu)	Rea (Rp Ribu)	Keu RL	Program/Kegiatan /Output	Vol / Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Rea (Rp Ribu)	Keu RL
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		14.866.614	13.391.407	90,08	Program Dukungan Manajemen		12474150	11779484	94.43
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM		12.295.050	11.385.714	92,60	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR		2,467,039	2,381,064	96.52
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	3.960.893	3.908.362	98,67	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	630 Orang	2,467,039	2,381,064	96.52
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1.527.427	1.234.962	80,85	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia		10,007,111	9,398,420	93.92
3	Layanan Perkantoran	1	6.806.730	6.242.390	91,71	Layanan Perkantoran	2 Layanan	6,796,297	6,356,260	93.53

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Tahun Anggaran 2020						Tahun Anggaran 2021				
NO	Program/Kegiatan/Output	Vol/Satuan	Pagu	Rea	Keu	Program/Kegiatan/Output	Vol/Satuan	Pagu	Rea	Keu
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RL			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RL
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi		1.531.092	1.264.047	82,56	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3 Layanan	623,574	606,752	97.3
4	Layanan Pelatihan	330	1.531.092	1.264.047	82,56	Layanan Umum	1 Layanan	284,313	152,361	53.59
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		636.495	448.118	70,40	Layanan Sarana Internal	153 Unit	1,370,185	1,366,920	99.76
5	Layanan Pelatihan	240	636.495	448.118	70,40	Layanan Prasarana Internal	1 unit	475,000	461,400	97.14
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional		403.977	293.529	72,66	Layanan SDM	38 Orang	271,935	271,730	99.92
6	Layanan Pelatihan	180	403.977	293.529	72,66	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	119,395	117,130	98.1
			<b>14.866.614</b>	<b>13.391.407</b>	<b>90,08</b>	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	66,412	65,867	99.18
								<b>12.474.150</b>	<b>11.77.9484</b>	<b>94.43</b>

Perbandingan tabel diatas menunjukkan bahwa target Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar untuk TA 2021 mengalami penurunan baik dari target *output* maupun dari anggaran. Penurunan anggaran dikarenakan Refocusing BPSDM Kementerian PUPR Tahun 2021.

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta SDA dan Permukiman

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Bidang Pelatihan	Jumlah Peserta	Komposisi Peserta							
					Laki-Laki	Perempuan	Pusat	Daerah	PNS	NON PNS	Lulus	Tidak Lulus
	<b>Pelatihan Bidang Sumber Daya Air</b>			<b>108</b>								
1	Teknis Hidrologi untuk Alokasi Air (Distance Learning)	15 s.d 25 Februari 2021	Sumber Daya Air	21	16	5	21	0	20	1	20	1
2	Perencanaan Modernisasi Irigasi (Distance Learning)	22 Februari s.d 03 Maret 2021	Sumber Daya Air	25	13	12	24	1	22	3	24	1
3	Pengelolaan Banjir Terpadu (Distance Learning)	01 s.d 17 Maret 2021	Sumber Daya Air	22	14	8	22	0	15	7	21	1
4	Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) (Distance Learning)	31 Mei s.d 09 Juni 2021	Sumber Daya Air	40	37	3	17	23	34	6	40	0
	<b>Pelatihan Bidang Permukiman</b>			<b>58</b>								
1	VERSI Inovasi Manajemen Dan Teknologi Bidang SPAM	15 s.d 25 Februari 2021	Cipta Karya	26	12	14	24	2	26	0	25	1
2	VERSI Pengawasan Konstruksi SPAM	02 s.d 16 Agustus 2021	Cipta Karya	32	23	9	32	0	21	11	32	0
	<b>Total</b>			<b>166</b>								



## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Jalan Jembatan, Perumahan dan Infrastruktur Wilayah

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Bidang Pelatihan	Jumlah Peserta	Komposisi Peserta							
					Laki-Laki	Perempuan	Pusat	Daerah	PNS	NON PNS	Lulus	Tidak Lulus
<b>Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan</b>				<b>194</b>								
1	VERSI Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	29 Maret s.d 09 April 2021	Bina Marga	21	12	9	21	0	21	0	20	1
2	VERSI Training Of Trainer Survei Inventarisasi, Inspeksi Cara Cepat dan Survei Lereng Jalan	15 s.d 26 April 2021	Bina Marga	29	21	8	29	0	29	0	27	2
3	VERSI Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beraspal (Asphalt Mixing Plant)	25 Okt sd 03 Nov 2021	Bina Marga	30	26	4	30	0	30	0	0	0
4	VERSI Perancangan Teknis Jembatan	23 Agustus s.d 04 September 2021	Bina Marga	38	26	12	38	0	38	0	38	0
5	VERSI Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan	05 s.d 14 Oktober 2021	Bina Marga	35	17	18	32	3	35	0	35	0
6	VERSI Preservasi Jalan	18 Oktober s.d 01 Nopember 2021	Bina Marga	41	30	11	29	12	41	0	0	0
<b>Pelatihan Bidang Perumahan</b>				<b>47</b>								
1	Perencanaan Penyelenggaraan Perumahan	08 s.d 22 Maret 2021	Perumahan Rakyat	23	10	13	17	6	22	1	23	0
2	Penyelenggaraan Rumah Susun	21 Juni s.d 01 Juli 2021	Perumahan Rakyat	24	12	12	24	0	18	6	24	0
<b>Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah</b>				<b>14</b>								
1	VERSI Penentuan Prioritas Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah	23 Februari 2021 s.d 04 Maret 2021	PIW	14	6	8	10	4	14	0	13	1
<b>Total</b>				<b>255</b>								

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Jalan Jembatan, Perumahan dan Infrastruktur Wilayah Berdasarkan Predikat

NO	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Pusat										Daerah										Keterangan Ke Tidak Lulusan
			PNS					NONPNS					PNS					NONPNS					
			B	BS	M	SM	TL	B	BS	M	SM	TL	B	BS	M	SM	TL	B	BS	M	SM	TL	
Pelatihan Bidang Jalan Dan Jembatan																							
1	Perancangan-Teknis-Jembatan	23 Agust s.d 04 Sept 2021	1	36	1																		
2	Penilai-Analisis-Dampak-Lalu-Lintas-	29 Maret s.d 09 April 2021		20			1																
3	Penyusunan-Renc-Anggaran-Biaya-Pek-Jln & Jbtn	05 s.d 14 Oktober 2021		29	3									1	2								
4	Preservasi Jalan	18 Okto s.d 01 Nov 2021		11	13		2							7	5								
5	Training-Of-Trainer-Survei-Inventarisasi,-Inspeksi-Cara-Cepat-dan-Survei-Lereng-Jalan	15 s.d 26 April 2021	2	23	2		2																
6	Pemeriksaan-Unit-Produksi-Campuran-Beraspal-(Asphalt-Mixing-Plant)--1	25 Okto s.d 03 Nov 2021	11	18	1																		
Pelatihan Bidang Peumahan																							
1	Perenc-Penyelenggaraan-Perumahan-	08 s.d 22 Maret 2021		15	1				1					6									
2	Penyelenggaraan-Rumah-Susun-	21 Juni s.d 01 Juli 2021		16	2				6														
Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah																							
1	Penentuan-Prioritas-Keterpaduan-Pembangunan-Infrastruktur-untuk-Pengembangan-Wilayah(1)	23 Februari s.d 04 Maret 2021	1	8			1							3	1								

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021)

**Tabel. Rekapitulasi Pelatihan dan Peserta Manajemen Konstruksi dan Pengembangan Jabatan Fungsional**

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Bidang Pelatihan	Jumlah Peserta	Komposisi Peserta								
					Laki-Laki	Perempuan	Pusat	Daerah	PNS	NON PNS	Lulus	Tidak Lulus	
<b>Pelatihan Bidang Manajemen Umum</b>													
1	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli (Blended Learning)	08 s.d 17 Juni 2021	Fungsional Bina Marga	35	22	13	30	5	35	0	35	0	
2	VERSI Pengelolaan BMN Distance Learning	28 Juni s.d 06 Juli 2021	Bidang Umum dan Manaj	30	25	5	30	0	16	14	30	0	
3	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli (Distance Learning)	18 s.d 26 Agustus 2021	Fungsional Bina Marga	29	16	13	20	9	29	0	29	0	
4	Teknis Tata Persuratan Distance Learning	30 Agust s.d 03 Sept 2021	Bidang Umum dan Manaj	34	7	27	34	0	13	21	33	1	
5	Kepemimpinan Pengawas	02 Juni s.d 17 Sept 2021	Kepemimpinan	25	14	11	25	0	25	0	24	1	
6	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli (Distance Learning)	14 s.d 24 Sept 2021	Fungsional Cipta Karya	29	20	9	26	3	29	0	29	0	
7	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli (Blended Learning)	28 Sept s.d 07 Okto 2021	Fungsional Cipta Karya	30	18	12	27	3	30	0	30	0	
8	Kepemimpinan Administrator	06 Juli s.d 15 Okto 2021	Kepemimpinan	23	16	7	23	0	23	0	20	3	
9	Perencanaan Anggaran Distance Learning	01 s.d 10 Nov 2021	Bidang Umum dan Manaj	31	13	18	31		20	11			
10	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli (Blended Learning)	16 s.d 26 Nov 2021	Fungsional Bina Marga	32	26	6	32	0	32	0	0	0	
11	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli (Blended Learning)	23 Nov s.d 02 Des 2021	Fungsional Cipta Karya	36	15	21	32	4	36	0	0	0	
<b>Pelatihan Bidang Manajemen Konstruksi</b>													
1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Blended Learning)	08 s.d 25 Februari 2021	Konstruksi	34	23	11	34	0	34	0	19	15	
2	VERSI Pengawasan Pekerjaan Konstruksi (Distance Learning)	05 s.d 14 Juli 2021	Konstruksi	33	19	14	29	4	30	3	31	2	
3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi (Distance Learning)	25 Okto s.d 02 Nov 2021	Konstruksi	19	12	7	19		18	1		1	
<b>Kerjasama (Kabupaten Konawe)</b>													
1	Pengawasan-Pekerjaan-Konstruksi-(Distance-Learning)	15 s.d 25 Nov 2021	Konstruksi	17	16	1		17	17			1	



**Tabel Pelatihan Sertifikasi**

No	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Bidang Pelatihan	Lembaga Sertifikasi	Total Peserta	Total Hadir Ujian	Total Tidak Hadir Ujian	Lulus Ujian	Tidak Lulus Ujian
1	Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	29/03/2021	Bina Marga	KEMENHUB	21	20	1	20	1
2	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Blended Learning)	08/02/2021	Konstruksi	LKPP	34	31	3	19	15
3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi (Distance Learning)	25/10/2021	Konstruksi	A2K4	19	18	1	18	1
4	Pengelolaan Banjir Terpadu (Distance Learning)	01/03/2021	Sumber Daya Air	HATHI	22	11	11	22	0
5	Teknis Hidrologi untuk Alokasi Air (Distance Learning)	15/02/2021	Sumber Daya Air	HATHI	21	14	7	21	0

### 4.3. Realisasi Anggaran

Perbandingan pencapaian kinerja Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan pencapaian kinerja T.A 2020 dan T.A 2021**

NO	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	T.A 2020		
				(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	Keuangan	Fisik	Kinerja
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>14.866.614</b>	<b>13.391.407</b>	<b>90.08</b>	<b>92.92</b>	<b>92.92</b>
	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM			12.295.050	11.385.714	92.6	92.6	92.6
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	3.960.893	3.908.362	98.67	98.67	98.67
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	1.527.427	1.234.962	80.85	80.85	80.85
3	Layanan Perkantoran	1	Layanan	6.806.730	6.242.390	91.71	91.71	91.71
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi			1.531.092	1.264.047	82.56	90.59	90.59
4	Layanan Pelatihan	330	Orang	1.531.092	1.264.047	82.56	90.59	90.59
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			636.495	448.118	70.4	100	100
5	Layanan Pelatihan	240	Orang	636.495	448.118	70.4	100	100
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional			403.977	293.529	72.66	100	100
6	Layanan Pelatihan	180	Orang	403.977	293.529	72.66	100	100
				<b>14.866.614</b>	<b>13.391.407</b>	<b>90.08</b>	<b>92.92</b>	

TA. 2021										
NO	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>12.474.150</b>	<b>11.779.484</b>	<b>100</b>	<b>94,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR			2.467.039	2.381.064	100	96,5	100	100	100
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	630	Orang	2.467.039	2.381.064	100	96,5	100	100	100
2	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia			10.007.111	9.398.420	100	93,9	100	100	100
2	Layanan Perkantoran	2	Layanan	6.796.297	6.356.260	100	93,5	100	100	100
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	623.574	606.752	100	97,3	100	100	100
4	Layanan Umum	1	Layanan	284.313	152.361	100	53,6	100	100	100
5	Layanan Sarana Internal	153	unit	1.370.185	1.366.920	100	99,8	100	100	100
6	Layanan Prasarana Internal	1	unit	475.000	461.400	100	97,1	100	100	100
7	Layanan SDM	38	orang	271.935	271.730	100	99,9	100	100	100
8	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	119.395	117.130	100	98,1	100	100	100
9	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	66.412	65.867	100	99,2	100	100	100
				<b>12.474.150</b>	<b>11.779.484</b>	<b>100</b>	<b>94,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

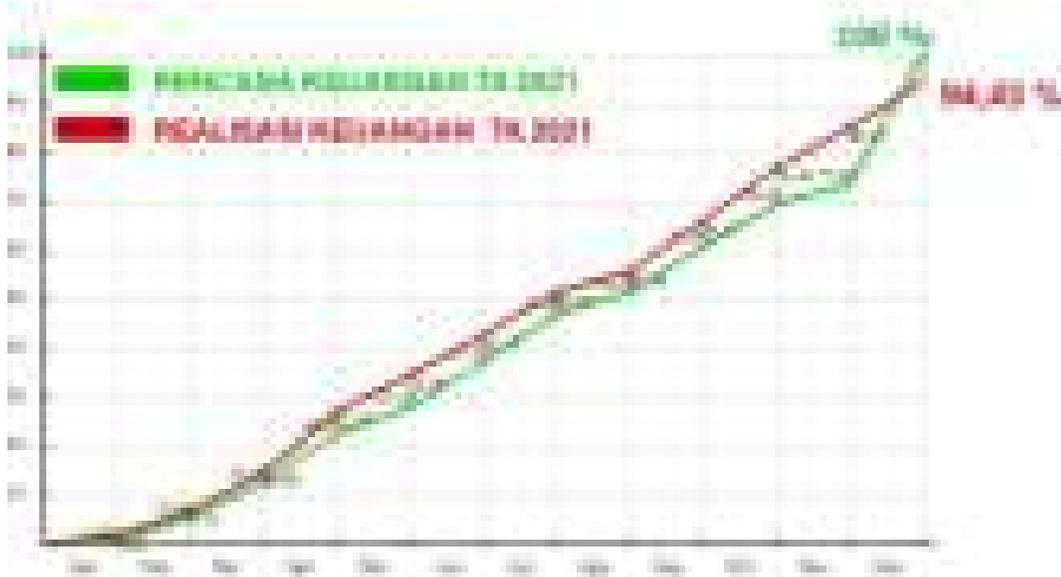
Keterangan		
Warna	Nilai Angka	Interprestasi
Merah	0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
Kuning	31 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
Purpl	51 - 65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
Hijau	66 - 75	Baik, perluh sedikit perbaikan
Biru	76 - 85	Sangat baik
Biru tua	86 - 100	Memuaskan

Berdasarkan tabel TA.2021 Capaian Kinerja per Desember yang terdiri dari :

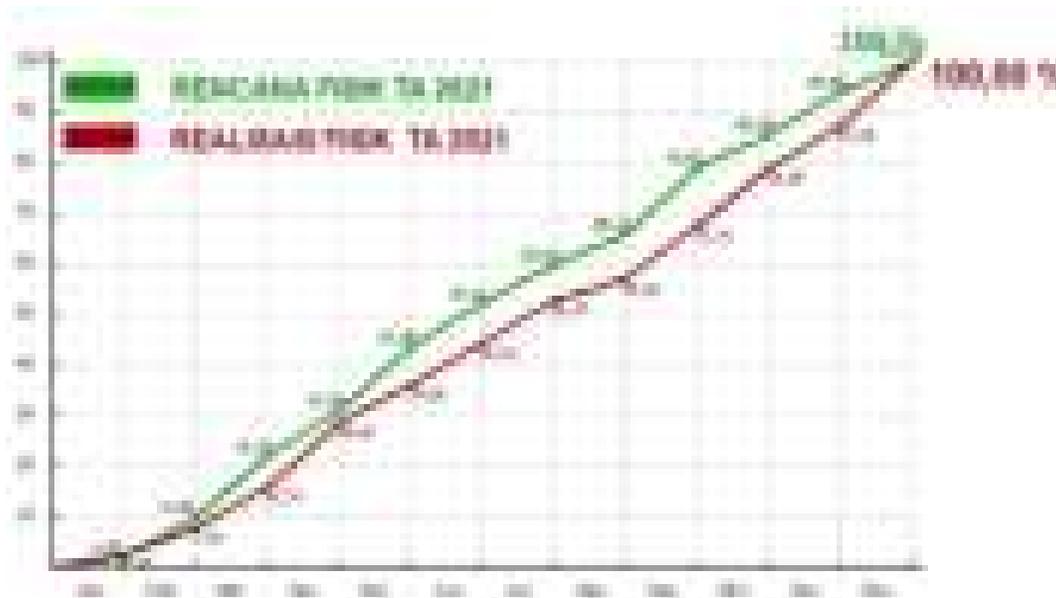
- Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal, rencana anggaran Rp.2.467.039.000 (100%) realisasi anggaran 2.381.064.000 (96.5%) sedangkan fisik rancana 100% realisasi 100% sehingga kinerja 100% kategori **Memuaskan**.
- Layanan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, rencana anggaran Rp. 10.007.111.000 (100%) realisasi anggaran 9.398.420.000 (93,9%) sedangkan fisik rancana 100% realisasi 100% sehingga kinerja 100% kategori **Memuaskan**.
- Namun masih terdapat 1 Layanan Umum yang nilai realisasinya masih dibawah rata-rata kinerja fisik dengan kategori **Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar** dikarenakan belum mencapai target keuangan dan fisik yang ditetapkan.



Gambar 2.1 Kurva S (Rencana dan Realisasi Keuangan) s.d Bulan Desember Tahun 2021



<b>Renc. e-Mon</b>	0,46	5,28	12,46	22,25	27,78	37	46,96	51,25	60,83	69,34	73,67	100
<b>Real. Keu</b>	1,62	6,73	14,59	27,09	34,45	42,75	51,41	55,58	66,12	76,96	85,03	94,43



<b>Renc. eMon</b>	1,87	9,98	21,91	30,93	43,36	52,11	59,64	65,63	78,81	85,49	93,98	100
<b>Real. Fis</b>	2,35	7,51	15,7	28,44	35,83	44,13	52,7	56,81	67,31	78,65	87,19	100

---

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Kebijakan penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian PUPR harus didukung dengan kesiapan Sumber Daya Manusia khususnya kompetensi SDM Kementerian PUPR. Peningkatan kompetensi SDM PUPR salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang merupakan tugas utama Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar dan menjadi Indikator Kinerja (IK) Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar. Secara garis besar nilai capaian kinerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar tahun 2021 dengan realisasi keuangan 94.43%, Fisik 100%.

#### **5.1. PERMASALAHAN**

Dari penjelasan yang sudah di uraikan maka terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar antara lain:

- a. Belum adanya Standar pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di luar Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar terutama pada pelatihan kerjasama khususnya masalah sarana dan prasarana sehingga dapat menyebabkan turunnya penilaian peserta pelatihan terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan,
- b. Adanya kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan laju penularan Covid-19 yang disesuaikan menurut level masing-masing Kabupaten/Kota yang sangat menghambat beberapa kegiatan dan proses bisnis di Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar,
- c. Belum optimalnya penajaman fungsi manajemen SDM terutama pada pembinaan karir pegawai,
- d. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dirasakan lebih optimal jika dilaksanakan melalui metode klasikal dibandingkan dengan metode distance learning,

- 
- e. Belum adanya SBK untuk pembayaran honor pendamping lapangan pelatihan,
  - f. Belum optimalnya Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar,
  - g. Saat pelaksanaan pelatihan widyaiswara masih banyak yang belum menyampaikan RBPMP (Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan) ke panitia penyelenggara.
  - h. Masih seringnya terjadi perubahan nama pelatihan dan jadwal pelaksanaan,
  - i. Peserta pelatihan yang sudah diberi surat perintah tugas mengikuti pelatihan terkadang masih harus menyelesaikan pekerjaan di instansinya sehingga membuat peserta tersebut tidak efektif dalam pelatihan dan berujung tidak lulus,
  - j. Adanya revisi DIPA sampai sepuluh kali, serta berganti-gantinya dan bertambahnya nama pelatihan, Adanya Refocusing anggaran dan Penghematan Anggaran akibat Covid 19.
  - k. Alokasi anggaran untuk pelatihan yang tidak sesuai, sehingga terdapat kelebihan anggaran,
  - l. Kurangnya SDM penyelenggara pelatihan jika dibandingkan dengan beban pelatihan yang harus dilaksanakan,
  - m. Adanya perubahan nama pelatihan dari Pusdiklat BPSDM pada saat pelaksanaan pelatihan akan dimulai dikarenakan tidak tersedianya calon peserta pelatihan sehingga harus dilakukan penggantian nama kegiatan pelatihan.

**Faktor Internal :**

- ❖ Minimnya jumlah pegawai yang sudah mengikuti MOT,
- ❖ Belum adanya Widyaiswara.

## 5.2. LANGKAH KE DEPAN

Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi, maka perlu langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penyelesaiannya adalah ;

- a. Tersedianya Standar pelaksanaan pelatihan kerjasama terkait sarana dan prasarana sehingga dapat dilakukan penilaian pelatihan terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan, serta memperluas jaringan Kerjasama dengan stake holder khususnya bagi instansi ke PU-an terkait pelatihan pengembangan kompetensi PUPR,
- b. Meningkatkan inovasi dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar,
- c. Melakukan pelatihan pegawai sesuai dengan tupoksinya baik pegawai PNS maupun Non PNS dalam rangka harmonisasi tugas dan fungsi,
- d. Perlu optimalisasi penajaman fungsi manajemen SDM terutama pada pembinaan karir pegawai,
- e. Perlu pengembangan sarana prasarana fisik dan non fisik terutama teknologi informasi dalam menghadapi kondisi Normal Baru (New Normal) yang diakibatkan pandemi Covid-19 serta pemeliharaan sarana dan prasana perlu ditingkatkan lagi,
- f. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perlu inovasi lebih lanjut dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung sehingga kualitas output peserta pelatihan lebih optimal,
- g. Diharapkan dapat tersedianya SBK untuk pembayaran honor pendamping lapangan pelatihan,
- h. Diharapkan SOP di lingkungan Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar dapat segera disusun seluruhnya,
- i. Widyaiswara dapat menyampaikan RBPMP (Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan) ke panitia penyelenggara sebelum proses belajar mengajar,
- j. Rapat koordinasi dengan Pusdiklat BPSDM agar terjadinya konsistensi 50 nama pelatihan dan jadwal pelaksanaan pelatihan,

- k. Diperlukan penajaman perencanaan terhadap target-target kinerja agar lebih sesuai dengan realisasinya. Peserta yang tidak diijinkan pimpinannya untuk mengikuti pelatihan agar dapat diganti dengan peserta lainnya / adanya peserta cadangan,
- l. Meningkatkan inovasi dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar,
- m. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perlu inovasi lebih lanjut dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung sehingga kualitas output peserta pelatihan lebih optimal.
- n. Diperlukan penambahan pegawai karena keterbatasan pegawai berdasarkan pada ABK 2021, minimal zero growth untuk menggantikan pegawai yang purnabakti setiap tahunnya,
- o. Diharapkan adanya koordinasi antara Pusdiklat BPSDM Kementerian PUPR dengan unit organisasi terkait (Bina Marga, SDA, dsb) dalam rangka penetapan nama calon peserta diklat, serta peningkatan koordinasi dengan pusdiklat terkait jaminan ketersediaan peserta;





Universitas Pendidikan Indonesia

## Certifikat

Penyelesaian Tugas Praktikum

Penyelesaian tugas praktikum (tugas) yang dilaksanakan di tingkat Sarjana (S1) pada tahun 2020/2021 ini telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan sebagai penyelesaian tugas praktikum.

Hal ini dinyatakan sebagai penyelesaian tugas praktikum yang dilaksanakan sebagai salah satu mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Matematika Sarjana (S1) UPI.

Penyelesaian

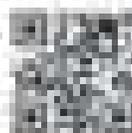
# B

Hal ini dinyatakan sebagai penyelesaian

Penyelesaian

Penyelesaian

Universitas Pendidikan Indonesia





## PURBAKARYA KEMERIA TAHUN 2021

Salah satu pelaksanaan kegiatan purbakarya adalah proses dan pelaksanaan survey lapangan dan pengukuran lokasi pelaksanaan kegiatan purbakarya tersebut. Untuk itu, diperlukan persiapan dan pelaksanaan survey!

Salah satu jenis kegiatan survey purbakarya yang akan dilakukan, dan sudah ada beberapa jenis alat dan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**Jenis:** Survey  
**Alat:** Untuk dan perlengkapan survey lapangan yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah:

**Jenis:** Survey  
**Alat:** Untuk dan perlengkapan survey lapangan

Salah satu jenis kegiatan survey purbakarya adalah sebagai berikut:

Salah satu jenis kegiatan survey purbakarya adalah sebagai berikut:

1. Untuk survey lapangan yang akan dilakukan, dan sudah ada beberapa jenis alat dan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
2. Untuk survey lapangan yang akan dilakukan, dan sudah ada beberapa jenis alat dan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tahun: 2021

Penyusun:

  
Penyusun

Tahun: 2021

  
Penyusun





REVISI

### PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2021

Salah satu kewajiban perusahaan pemerintah adalah melaksanakan semua aktivitas dan pekerjaan sesuai prosedur, peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi.

Salah satu kewajiban perusahaan pemerintah adalah melaksanakan semua aktivitas dan pekerjaan sesuai prosedur, peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi.

**Nama:** [Blank]  
**Jabatan:** [Blank]  
**Departemen:** [Blank]

**Nama:** [Blank]  
**Jabatan:** [Blank]  
**Departemen:** [Blank]

Salah satu kewajiban perusahaan pemerintah adalah melaksanakan semua aktivitas dan pekerjaan sesuai prosedur, peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi.

Salah satu kewajiban perusahaan pemerintah adalah melaksanakan semua aktivitas dan pekerjaan sesuai prosedur, peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi.

1. Untuk memenuhi kewajiban ini, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi.
2. Untuk memenuhi kewajiban ini, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berprestasi.

[Signature]  
[Name]  
[Title]

[Signature]  
[Name]  
[Title]





### PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

Adapun secara resmi perusahaan menyatakan bahwa pada kesempatan ini kami mengundang bapak/ibu untuk melakukan wawancara sebagai persyaratan untuk melanjutkan proses rekrutmen di perusahaan kami.

Informasi mengenai perusahaan yang kami butuhkan dan kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan bapak/ibu sebagai berikut:

**Nama Perusahaan:** PT. BINA HARAPAN  
**Alamat Perusahaan:** Jl. ...

**Tempat dan Waktu Pengisian:**

**Nama Pekerjaan:** ...  
**Tempat Kerja:** ...

Informasi lainnya yang kami butuhkan adalah sebagai berikut:

1. Kami meminta agar bapak/ibu mengisi formulir yang kami sediakan dan mengirimkan kembali ke perusahaan kami.

2. Kami juga akan melakukan wawancara dengan bapak/ibu mengenai pengalaman kerja, kemampuan, dan minat kerja di perusahaan kami. Kami akan menghubungi bapak/ibu mengenai informasi lebih lanjut mengenai proses rekrutmen kami.

3. Kami akan melakukan wawancara dengan bapak/ibu mengenai minat kerja di perusahaan kami dan informasi lainnya yang dibutuhkan kami.

Demikian surat ini kami sampaikan.

HR Manager

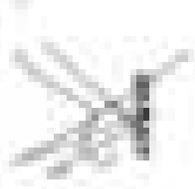
PT. BINA HARAPAN

**PERKALAN SPESIAL TUGAS SISI**

Buatlah perincian pekerjaan khusus yang akan dilakukan untuk keperluan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri, termasuk biaya perjalanan, akomodasi, transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas ke luar negeri.

No	Uraian Pekerjaan	Masa Kerja
1	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
2	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
3	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
4	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
5	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
6	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
7	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
8	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
9	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
10	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
11	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
12	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
13	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari
14	Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan surat perintah dan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri.	10 hari

Disetujui oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi







PELATIHAN INOVASI MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI BIDANG SPAM



**PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR  
(BLENDED LEARNING)**





**PELATIHAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI  
(BLENDED LEARNING)**



**PELATIHAN PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
(BLENDED LEARNING)**



## Pelatihan Kepemimpinan Pengawas





ALPU



Pergerakan Publik  
PPSC



Living Room  
PPSC

ALPU



Kamar Tidur



ALPU



Mexis T&T & Kurnia VIP



ALPU



Lounge Room



2 PU 1/2

### Smartclass



2 PU 1/2

### Meeting Room 1



2 PU 1/2

### Meeting Room 2



2 PU 1/2

### Ruang Relaksasi Indoor & Persekolahan





